

ABSTRAK

Aksi vandalisme atau coret-coretan di tembok atau tembok ruang publik di Jombang kembali marak dan sulit dikendalikan, seperti yang terlihat di tembok area trotoar Jalan KH. Ahmad Dahlan dan di Alun-alun Jombang. Sangat diperlukan penelitian lebih dalam untuk melihat bagaimana hukum yang berlaku mengatur mengenai tindak pidana vandalisme serta bagaimana penerapan sanksi terhadap tindak pidana vandalisme di Kabupaten Jombang. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan, kemudian menggunakan analisis data secara kualitatif.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain adalah Faktor Hukum itu sendiri, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Pra-sarana, Faktor Masyarakat, serta Faktor Kebudayaan.

Hasil penelitian menyatakan tidak sesuai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 09 Tahun 2010 dalam penegakan hukum tindak pidana vandalisme di kabupaten Jombang. Satpol PP sebagai aparat penegak hukum yang berkewajiban menegakkan peraturan daerah tidak memberikan sanksi pidana kepada para pelaku melainkan hanya mengenakan sanksi berupa ganti kerugian. Hendaknya dalam penegakan hukum dapat melibatkan seluruh aparat penegak hukum dan yang terpenting adalah dukungan pemerintahan yang bersih. Penerapan sanksi terhadap tindak pidana vandalisme di Kabupaten Jombang hendaknya lebih bisa ditekankan lagi oleh Aparat Satpol PP sebagai penegak Perda yang ada, sehingga dapat menyelaraskan aturan yang berlaku dan dapat meminimalkan Tindakan vandalisme yang menyalahi aturan yang sudah ada.

Kata Kunci: Vandalisme, Penegakan Hukum, Sanksi Pidana.

ABSTRACTS

Actions of vandalism or graffiti on the walls or walls of public spaces in Jombang are again rife and difficult to control, as seen on the walls of the sidewalk area of Jalan KH. Ahmad Dahlan and in Jombang Square. Deeper research is really needed to see how the applicable law regulates the crime of vandalism and how sanctions are applied to the crime of vandalism in Jomban Regency. The research method used is empirical research. The approach used is a conceptual approach and statutory approach, then using qualitative data analysis.

The main problem of law enforcement actually lies in the factors that influence it, including the legal factor itself, the law enforcement factor, the infrastructure factor, the community factor, and the cultural factor.

The results of the study stated that the implementation of the Regional Regulation of Jombang Regency Number 09 of 2010 was not appropriate in enforcing the law on vandalism in Jombang Regency. Satpol PP as law enforcement officers who are obliged to enforce regional regulations does not give criminal sanctions to the perpetrators, but only imposes sanctions in the form of compensation. It is desirable that all law enforcement officers are involved in law enforcement and what is most important is the support of a clean government. It is hoped that the implementation of sanctions for acts of vandalism in Jomban Regency will be even more stringent by the Satpol PP apparatus as enforcers of existing regional regulations, so that they can harmonize existing regulations and can minimize acts of vandalism that violate existing regulations.

Keywords: *Vandalism, Law Enforcement, Criminal Sanctions.*